

ABSTRAK

Perkembangan pencarian dan pertolongan di Indonesia dewasa ini cukup pesat, tidak hanya menyangkut berbagai jenis bencana, kecelakaan dan kondisi membahayakan jiwa, tapi teknologi yang digunakan serta fasilitas pendukungnya sudah mengarah pada penggunaan alat yang canggih. Sayangnya hal ini belum berbanding lurus dengan perlindungan hukum petugas pencarian dan pertolongan (*rescuer*). Undang-Undang Pencarian dan Pertolongan yang ada saat ini belum secara eksplisit mengatur perlindungan hukum terhadap petugas pencarian dan pertolongan (*rescuer*) di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merangkum tiga tujuan penelitian, yaitu, pertama, menjelaskan dan menganalisis instrument hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap petugas pencarian dan pertolongan (*rescuer*) di Indonesia saat ini, kedua, mendeskripsikan dan menganalisis kelemahan-kelemahan perlindungan hukum terhadap petugas pencarian dan pertolongan (*Rescuer*) di Indonesia saat ini, dan ketiga, menganalisis dan merekonstruksi perlindungan hukum petugas pencarian dan pertolongan (*rescuer*) di Indonesia yang berbasis nilai berkeadilan. Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, khususnya kebijakan hukum dalam bidang pencarian dan pertolongan, dilakukan dengan wawancara, observasi dan perbandingan. Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis, yaitu paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teori hukum yang digunakan teori keadilan, teori kewenangan, teori pertanggungjawaban hukum, teori sistem hukum dan teori perlindungan hukum. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan merupakan Undang-Undang utama dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan di Indonesia saat ini, selain sebagaimana undang-undang tersebut, masih terdapat Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Undang-Undang Penerbangan dan Undang-Undang Pelayaran yang memberikan tugas terhadap Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) sebagai instansi induk petugas pencarian dan pertolongan (*Rescuer*) dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini belum mengatur secara eksplisit perlindungan hukum petugas pencarian dan pertolongan (*rescuer*), secara kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) juga perlu melakukan restrukturisasi organisasi pada tingkat Kantor Pencarian dan Pertolongan sampai tingkat Pos Pencarian dan Pertolongan, penambahan jumlah sumber daya manusia, serta perlu adanya pendidikan formal tentang pencarian dan pertolongan dimulai dari jenjang pendidikan dasar. Sehingga penulis melakukan rekonstruksi perlindungan hukum petugas pencarian dan pertolongan (*rescuer*) yang berkeadilan, terkhusus pada pasal 8, pasal 35 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan.

Kata kunci : Rekonstruksi, *Rescuer*, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

The development of search and rescue in Indonesia today is quite rapid, not only concerning various types of disasters, accidents and life-threatening conditions, but the technology used and its supporting facilities have led to the use of sophisticated tools. Unfortunately, this is not directly proportional to the legal protection of rescuers. The current search and rescue law does not explicitly stipulate legal protection for rescuers in Indonesia. Based on this background, the researcher summarizes three research objectives, namely, first, to explain and analyze the legal instruments that regulate the legal protection of rescuers in Indonesia at this time, second, to describe and analyze the weaknesses of legal protection against officers. current rescuer in Indonesia, and thirdly, analyze and reconstruct the legal protection of rescuers in Indonesia based on the value of justice. The approach taken is empirical normative juridical, namely an approach by looking at a legal reality in society, especially legal policies in the field of search and rescue, carried out by interviews, observations and comparisons. The paradigm used in this research is the constructivist paradigm. The constructivist paradigm is a paradigm that is almost the antithesis of the notion that puts observation and objectivity in finding a reality or science. With this type of qualitative descriptive research. The legal theory used is the theory of justice, the theory of authority, the theory of legal responsibility, the theory of the legal system and the theory of legal protection. From the results of the study, it can be concluded that Law Number 29 of 2014 concerning Search and Rescue is the main law in the implementation of search and rescue in Indonesia at this time, apart from that law, there is still a Disaster Management Law Road Transport Traffic, Aviation Law and Shipping Law which assign tasks to the National Search and Rescue Agency (Basarnas) as the main agency for rescuers(Rescuer) in conducting search and rescue. The existing laws and regulations have not explicitly regulated the legal protection of rescuers(rescuer), institutionally the National Search and Rescue Agency (Basarnas) also needs to restructure the organization at the level of the Search and Rescue Office to the level of the Search and Rescue Post. , increasing the number of human resources, as well as the need for formal education about search and help starting from the basic education level. So that the authors reconstruct the legal protection of rescuerswho are fair, especially in Article 8, Article 35 and Article 39 of Law Number 29 of 2014 concerning Search and Help.

Keywords: Reconstruction, Rescuer, Legal Protection.